

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK**

**(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi
Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota
Semarang)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

RAHAYU HANA PUSPITA RUSLI

NIM. 12030110141072

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rahayu Hana Puspita Rusli

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141072

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK (Studi
Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang
Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang)**

Dosen Pembimbing : Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MSAcc, Akt.

Semarang, 20 Agustus 2014

Dosen Pembimbing,

(Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MSAcc, Akt.)

NIP. 196101091988031001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Rahayu Hana Puspita Rusli

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141072

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK (Studi
Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang
Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 03 September 2014

Tim Penguji

1. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MSAcc, Akt. (.....)

2. Drs. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. (.....)

3. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rahayu Hana Puspita Rusli, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 20 Agustus 2014

Yang membuat pernyataan,

(Rahayu Hana Puspita Rusli)

NIM : 12030110141072

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- “Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah cacat, dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta”. **Albert Einstein**
- “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. **Q.S. Al-Baqarah: 153**
- “Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali”. **Mario Teguh**

Skripsi ini saya persembahkan untuk Papa dan Mama tercinta:

Alm. Rusli Slamet dan Sri Indah Karyaningsih,

Kedua Kakak tersayang:

Rangga Yudistira Rusli dan Rengganí Gita Permata Rusli,

Serta seluruh keluarga dan sahabat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Penelitian ini terdiri atas empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, serta pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif di mana data didapatkan dari kuesioner dengan teknik *Random Sampling*. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Semarang. Analisis data penelitian menggunakan regresi linier berganda, dengan bantuan program SPSS 20.00 *for Windows*.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, serta pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that affect individual taxpayers in meeting their to pay taxes obligation. This research consists of four independent variables and one dependent variable. Independent variables in this research are tax consciousness, tax penalties, tax authorities attitude, and knowledge and understanding of tax regulations. While the dependent variable in this research is taxpayer's compliance.

This study uses quantitative research methods, where the data obtained from questionnaires with Random Sampling technique. Respondents were sampled in this study are an individual taxpayer who carries on business in the city of Semarang. Analysis of research data using multiple linear regression analysis with SPSS 20.00 program for Windows.

Based on the results of the analysis has been done, this research shows that the tax consciousness, tax penalties, tax authorities attitude, and knowledge and understanding of tax regulations have a positive and significant impact on taxpayer's compliance.

Keywords: *Taxpayer's compliance, tax consciousness, tax penalties, tax authorities attitude, and knowledge and understanding of tax regulations.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah robbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ph.D., Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MSAcc, Akt., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan pengajaran dan bekal ilmu pengetahuan serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Papa (Alm. Rusli Slamet) dan Mama (Sri Indah Karyaningsih) atas segala cinta, kasih sayang, perhatian, dukungan, kepercayaan,

kesabaran, pengorbanan serta doa yang tulus selama ini. Semoga aku dapat menjadi anak yang dapat Papa dan Mama banggakan.

7. Kedua kakakku tersayang, Rangga Yudistira Rusli dan Renggani Gita Permata Rusli atas motivasi, nasihat, perhatian serta doa yang tidak pernah putus. Kalian adalah kakak yang luar biasa hebatnya bagiku.
8. Bule Dewi, Om Agus, Teh Fitri dan Aa Bono yang sangat peduli padaku, selalu menyemangati dan mendoakanku di samping orang tua dan kedua kakakku.
9. Sahabat-sahabatku, Destari Mahalaksmi, Susan Karuniawati, Destianty Nur, Mila Yanuar dan Diaz Syafitri yang selalu menanti kepulanganku ke Bandung.
10. Hanifah K. Ulfasari, Dewi Nindyastuti, Indah Purwati dan Elsa Linggasari untuk persahabatan yang begitu manis dari awal perkuliahan hingga saat ini, semoga persahabatan ini tidak pernah berakhir.
11. Nandha Rakhmalia, terima kasih telah menjadi pendengar keluh kesahku, teman berbagi di kala suka dan duka, serta teman seperjuangan selama penyelesaian skripsi.
12. Titus Wembie dan keluarga yang sudah aku anggap bagian dari keluargaku selama di Semarang. Terima kasih atas semua doa dan kasih sayang yang telah diberikan.
13. Teman-teman S1 Akuntansi Reguler II angkatan 2010 kelas B, terima kasih atas cerita indah yang kalian ciptakan selama empat tahun ini.
14. Teman-teman TIM II KKN UNDIP Tahun 2013 Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kedungwuni, khususnya Desa Pajomblangan. Galang, Mbak Astrid, Bulan, Galuh, Rey, Ata, Linda, Rachmad dan Mas Bintang, terima kasih atas kebersamaan, kekompakkan, kekeluargaan yang terjalin hingga saat ini.
15. Bu Elya dan Mas Ghufroon atas izin dan waktu yang diberikan dalam membantu menyebarkan kuesioner di Bank BJB Cabang Semarang.
16. Semua responden dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 20 Agustus 2014

Penulis

(Rahayu Hana Puspita Rusli)

NIM : 12030110141072

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	15
2.1.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1.1 Teori Atribusi (<i>Atribution Theory</i>).....	15
2.1.1.2 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	17

2.1.1.3	Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.1.1.4	Kesadaran Perpajakan.....	22
2.1.1.5	Sanksi Pajak.....	24
2.1.1.6	Sikap Fiskus.....	26
2.1.1.7	Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan.....	28
2.1.2	Penelitian Terdahulu.....	32
2.2	Kerangka Pemikiran.....	33
2.3	Hipotesis.....	34
2.3.1	Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar Pajak.....	34
2.3.2	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar Pajak.....	35
2.3.3	Pengaruh Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar Pajak.....	36
2.3.4	Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar Pajak.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....		39
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	39
3.1.1	Variabel Penelitian.....	39
3.1.2	Definisi Operasional.....	39
3.1.2.1	Variabel Independen.....	39
3.1.2.2	Variabel Dependen.....	42
3.2	Populasi dan Sampel.....	43
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	45
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	45

3.5 Metode Analisis.....	46
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif.....	46
3.5.2 Uji Reliabilitas dan Validitas.....	46
3.5.2.1 Uji Reliabilitas.....	46
3.5.2.2 Uji Validitas.....	47
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	47
3.5.3.1 Uji Normalitas.....	47
3.5.3.2 Uji Multikolinieritas.....	49
3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	49
3.5.4 Analisis Regresi.....	50
3.5.5 Pengujian Hipotesis.....	51
3.5.5.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	51
3.5.5.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F).....	52
3.5.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	52
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	53
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	53
4.2 Analisis Data.....	56
4.2.1 Uji Statistik Deskriptif.....	56
4.2.2 Uji Kualitas Data.....	59
4.2.2.1 Uji Reliabilitas.....	59
4.2.2.2 Uji Validitas.....	61
4.2.3 Uji Analitis Data.....	64
4.2.3.1 Uji Asumsi Klasik.....	65
4.2.3.1.1 Uji Normalitas.....	65
4.2.3.1.2 Uji Multikolinieritas.....	67

4.2.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas.....	69
4.2.4 Pengujian Hipotesis.....	72
4.2.4.1 Koefisien Determinasi.....	72
4.2.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)....	73
4.2.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	74
4.3 Interpretasi Hasil.....	76
4.3.1 Kesadaran Perpajakan.....	76
4.3.2 Sanksi Pajak.....	78
4.3.3 Sikap Fiskus.....	80
4.3.4 Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan.....	81
BAB V PENUTUP.....	83
5.1 Simpulan.....	83
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	85
5.3 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2014.....	3
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan WPOP Usahawan di Kota Semarang Tahun 2008 hingga 2010.....	9
Tabel 2.1 Tarif Pajak.....	31
Tabel 2.2 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4.1 Seleksi Sampel Penelitian.....	53
Tabel 4.2 Demografi Responden.....	54
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel.....	56
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Reliabilitas.....	60
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Validitas.....	62
Tabel 4.6 Uji Normalitas.....	65
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Multikolinieritas.....	68
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser.....	70
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi.....	72
Tabel 4.10 Uji Statistik F.....	73
Tabel 4.11 Uji Statistik t.....	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1 Histogram Normalitas.....	66
Gambar 4.2 Normal P-P Plot.....	67
Gambar 4.3 Scatterplot.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Kuesioner Penelitian.....	91
Lampiran B Hasil Olah Data Statistik.....	98
Lampiran C R Tabel.....	112
Lampiran D T Tabel.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian pertama dalam penelitian ini adalah pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

1.5 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia didirikan dengan komitmen para *founding fathers* untuk mewujudkan Negara Indonesia yang makmur, sejahtera, cerdas, sekaligus berkontribusi pada perdamaian dunia. Bukan hal yang mudah untuk mewujudkannya, dan diperlukan daya dan upaya dari penyelenggara negara beserta dukungan penuh masyarakat (news.detik.com). Upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu diperlukan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan bernegara dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Untuk mewujudkan cita-citanya, negara membutuhkan sumber dana, yang saat ini didominasi oleh pajak. Hardiningsih dan Yulianawati (2011) berpendapat bahwa dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Pajak merupakan sumber pemasukan kas negara yang utama, yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara dengan tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat. Menurut Wandansari (2013), pembangunan dapat lancar apabila terdapat sumber dana yang mendukung. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang semakin besar, pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Saraswati (2012) berpendapat bahwa dalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad secara perlahan melepaskan ketergantungan dari luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di mana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar (Susanto, 2013). Menurut Tiraada (2013), saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. Berikut disajikan realisasi penerimaan negara sejak tahun 2007 hingga 2014.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2014

Sumber Penerimaan	2007 ¹⁾	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾	2010 ¹⁾	2011 ¹⁾	2012 ¹⁾	2013 ²⁾	2014 ³⁾
I. Penerimaan Dalam Negeri	706 108	979 305	847 096	992 249	1 205 346	1 332 323	1 497 521	1 661 148
Penerimaan Perpajakan	490 988	658 701	619 922	723 307	873 874	980 518	1 148 365	1 310 219
Pajak Dalam Negeri	470 052	622 359	601 252	694 392	819 752	930 862	1 099 944	1 256 304
Pajak Penghasilan	238 431	327 498	317 615	357 045	431 122	465 070	538 760	591 621
Pajak Pertambahan Nilai	154 527	209 647	193 067	230 605	277 800	337 584	423 708	518 879
Pajak Bumi dan Bangunan	23 724	25 354	24 270	28 581	29 893	28 969	27 344	25 541
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5 953	5 573	6 465	8 026	- 1	0	0	0
Cukai	44 679	51 252	56 719	66 166	77 010	95 028	104 730	114 284
Pajak Lainnya	2 738	3 035	3 116	3 969	3 928	4 211	5 402	5 980
Pajak Perdagangan Internasional	20 936	36 342	18 670	28 915	54 122	49 656	48 421	53 915
Bea Masuk	16 699	22 764	18 105	20 017	25 266	28 418	30 812	33 937
Pajak Ekspor	4 237	13 578	565	8 898	28 856	21 238	17 609	19 978
Penerimaan Bukan Pajak	215 120	320 604	227 174	268 942	331 472	351 805	349 156	350 930
Penerimaan Sumber Daya Alam	132 893	224 463	138 959	168 825	213 823	225 844	203 730	198 088
Bagian laba BUMN	23 223	29 088	26 050	30 097	28 184	30 798	36 456	37 000
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	56 873	63 319	53 796	59 429	69 361	73 459	85 471	91 083
Pendapatan Badan Layanan Umum	2 131	3 734	8 369	10 591	20 104	21 704	23 499	24 759
II. Hibah	1 698	2 304	1 667	3 023	5 254	5 787	4 484	1 360
Jumlah	707 806	981 609	848 763	995 272	1 210 600	1 338 110	1 502 005	1 662 509

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat yang merupakan wujud kewajiban dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional (Herry, 2010 dalam Nugroho, 2012). Penerimaan PPh mengalami peningkatan di setiap tahunnya, terkecuali untuk tahun 2009. Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2009 terjadi penurunan sebesar 5,89% dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan pada setiap tahunnya seharusnya diimbangi dengan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa adanya penurunan kepatuhan WP untuk membayar pajak dikarenakan berkurangnya kesadaran WP untuk membayar pajaknya, yang kontras dengan harapan negara akan pajak penghasilan yang meningkat.

Menyadari akan pentingnya peran pajak, pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara, baik dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Menurut Herryanto dan Toly (2013), ekstensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah WP aktif. Sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan WP, meningkatkan kualitas pelayanan untuk WP, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum. Adapun Hardiningsih dan Yulianawati (2011) berpendapat bahwa usaha

ekstensifikasi dilakukan dengan menggali atau memperluas obyek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan. Sedangkan usaha intensifikasi ditempuh melalui perbaikan kualitas pengumpulan di lapangan tanpa harus merubah undang-undang yang berlaku.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para WP itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan WP untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri (Arum, 2012). Salah satu alasan diberlakukannya reformasi sistem *self assessment* adalah untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Tiraada (2013) mengemukakan bahwa *self assessment system* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat WP untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system*. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan WP (*tax compliance*). Kepatuhan WP yaitu bagaimana sikap dari seorang WP yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada.

Dalam kaitannya dengan WP, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan menurut Mahon (2001) dalam Sulistiyono (2012) adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang

dapat sesuai dengan yang diharapkan. Perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi. Peningkatan kepatuhan WP untuk memenuhi kewajibannya perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dan secara berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak mendekati tercapai (Sulistiyono, 2012). Target pajak dapat diwujudkan bila tercapai kesadaran dan kepatuhan masyarakat WP untuk dapat memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Sadhani (2004 dikutip dari Tarjo dan Kusumawati, 2006) menjelaskan bahwa rendahnya kepatuhan dan kesadaran WP bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Kesadaran WP atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan WP (Jatmiko, 2006). Menurut Tiraada (2013), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hasil penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menemukan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Sehingga diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh WP. Rajif (2012) berpendapat bahwa agar peraturan

perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. WP akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Rajif (2012) juga menemukan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada WP. Menurut Rajif (2012), banyak dari WP yang berpendapat bahwa aparat pajak hanya bisa berkuasa padahal kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Hal ini membuat tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi terpengaruh. Susanto (2013) mengemukakan bahwa penyebab utama WP melakukan upaya penghindaran pajak adalah kejadian masa lalu yang membentuk persepsi negatif pada masyarakat terhadap instansi perpajakan berikut oknum-oknumnya. Persepsi tersebut juga dibentuk oleh sederetan kasus pajak yang membelit negeri ini dan banyak kasus korupsi lainnya yang sedang mewabah di Indonesia. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan WP. Penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya.

Pengetahuan teknis perpajakan yang memadai, memegang peran penting agar WP dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Bila setiap WP mengetahui dengan jelas tentang kriteria WP dan perhitungannya, maka WP akan memiliki kesadaran dan patuh dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan Rahmawaty, dkk (2011), Hardiningsih dan Yulianawati (2011), serta Edo, dkk (2013) yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

Tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah, tidak terkecuali bagi WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Kota Semarang hingga tahun 2010 mencatat terdapat sebanyak 37.639 WPOP usahawan yang terdaftar dan sebanyak 31.607 WPOP usahawan yang efektif. Namun hanya sebanyak 17.438 WPOP usahawan yang menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WPOP usahawan di Kota Semarang hanya 55%. Tabel 1.2 di bawah ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan WPOP usahawan di Kota Semarang.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan WPOP Usahawan di Kota Semarang
Tahun 2008 hingga 2010

No.	Tahun	WPOP Usahawan Terdaftar	WPOP Usahawan Efektif	WPOP Usahawan yang Menyampaikan SPT	Persentase <i>Tax Compliance</i>
1.	2008	28.932	22.101	15.767	71%
2.	2009	33.960	27.419	18.745	68%
3.	2010	37.639	31.607	17.438	55%

Sumber: KPP Pratama se-Kota Semarang

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 di atas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2008 hingga 2010, tingkat kepatuhan WPOP usahawan di Kota Semarang cenderung menurun. Hal itu tentu membutuhkan suatu kajian lebih lanjut agar tidak terjadi berlarut-larut. Oleh karena itu, diperlukan kajian secara intensif guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP, khususnya WPOP yang melakukan kegiatan usaha di Kota Semarang.

Beberapa penelitian di atas menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Meski demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain subyek penelitian, lokasi penelitian, dan variabel penelitian. Sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji mengenai tingkat kepatuhan WP orang pribadi secara keseluruhan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, wajib mengisi SPT Tahunan Form 1770. WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Dipilihnya WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai responden dikarenakan oleh adanya kemungkinan WP tersebut akan menghindari kewajiban untuk membayar pajak, atau lebih rentan terhadap pelanggaran pajak. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Meskipun pembukuan atau pencatatan dapat dilakukan dengan mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi, namun kebanyakan dari mereka lebih memilih melakukannya sendiri, dengan alasan kurang efisien dalam hal biaya jika pembukuan atau pencatatan dilakukan orang lain. Hal inilah yang dapat menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya.

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang karena berdasarkan data dari KPP Pratama Semarang, diketahui bahwa tingkat kepatuhan WP orang pribadi cenderung menurun tiap tahunnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP orang pribadi. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, serta pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dilakukanlah penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG**

MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang).’’

1.6 Rumusan Masalah

Self assessment system yang berlaku di Indonesia setelah diadakannya reformasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan, tetapi tingkat kepatuhan pajak cenderung menurun. Hal ini seperti yang terjadi di Kota Semarang, di mana pada tahun 2013 tingkat kepatuhan WP orang pribadi hanya mencapai 52% dan tergolong masih rendah. Menurut data statistik, WP orang pribadi di Kota Semarang selalu meningkat setiap tahunnya, namun pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) justru menurun. Rendahnya kepatuhan pajak ini mendorong perlunya dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak?
3. Apakah sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak?

4. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak?

1.7 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.7.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak.
- b. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak.
- c. Untuk menganalisis pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak.
- d. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak.

1.7.2 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan WP. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

b. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dalam penelitian ini adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, serta pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, terutama bagi daerah lokasi penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Pada bagian telaah pustaka berisi landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Pada bagian ini juga dikemukakan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

Landasan teori berisi penjelasan mengenai teori dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.1.1 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain (Fikriningrum, 2012). Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan WP dapat dikaitkan dengan sikap WP dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996 dalam Fikriningrum, 2012). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

Menurut Robbins dan Judge (2008) dalam Masruroh (2013), penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor berikut:

1. Kekhususan

Kekhususan merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

2. Konsensus

Konsensus merujuk pada apakah semua individu yang menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal.

Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi merujuk pada apakah individu selalu merespons dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, semakin tidak konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

2.1.1.2 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku WP yang tidak patuh (*noncompliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Tiraada, 2013), yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2. *Normative Beliefs*

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Atau *normative belief*

adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan *normative beliefs* adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.

3. *Control Beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya yang menggunakan teori tersebut adalah penelitian Tiraada (2013). Dikaitkan dengan penelitian ini, *theory of planned behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran WP. WP yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*). Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif

dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan sikap fiskus, di mana dengan adanya sikap yang baik dari petugas pajak, peraturan perpajakan yang jelas, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada WP agar taat pajak, akan membuat WP memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. Adapun sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar WP mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan WP akan ditentukan berdasarkan persepsi WP tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku WP untuk taat pajak.

2.1.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Budiarmanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah WP, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Mahon (2001) dalam Sulistiyono (2012) mengatakan bahwa kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Kepatuhan WP menurut Tiraada (2013) merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan WP menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya sendiri. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang “Tata Cara Pemeriksaan”, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (2012) menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan dalam hubungannya dengan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak.
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi.

- c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan.
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap WP yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP. Pemeriksaan ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor dan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan yang dimaksud meliputi standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Dengan dilakukannya pemeriksaan tersebut diharapkan dapat mengarahkan WP untuk taat/patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang “Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan WP dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak” menyebutkan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai WP dengan kriteria tertentu, WP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.1.4 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif WP terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Kesadaran membayar pajak menurut Widayati dan Nurlis (2010) merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar pajak kepada kas negara untuk kepentingan bersama. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia

meliputi kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.

Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong WP untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, WP mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. WP mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. WP akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Muliari dan Setiawan (2011) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kesadaran masyarakat rendah dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Sadhani (2004 dikutip dari Tarjo dan Kusumawati, 2006) menjelaskan bahwa rendahnya kepatuhan dan kesadaran WP bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Dalam Jatmiko (2006), Soemarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijamin. Masih dalam Jatmiko (2006), Lerche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.1.5 Sanksi Pajak

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar

Undang-Undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Hal serupa dikemukakan oleh Mardiasmo (2006) dalam Muliari dan Setiawan (2011), yang di maksud dengan sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar WP tidak melanggar norma perpajakan.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009 dalam Muliari dan Setiawan, 2011) sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik WP.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Menurut Saefudin (2003) dalam Jatmiko (2006), Undang-Undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi WP yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik atau pun piagam penghargaan. Walaupun WP tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, WP akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rajif (2012) berpendapat bahwa agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. WP akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh sebab itu, sikap atau pandangan WP terhadap sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak.

2.1.1.6 Sikap Fiskus

Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada WP. Jatmiko (2006) mengatakan bahwa pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah wajib pajak).

Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap WP. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan WP membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (*attitude*) WP dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus, maka WP akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan (Nugroho, 2012). Hal serupa dijelaskan oleh Ilyas dan Burton (2010) dalam Arum (2012) bahwa sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh WP karena dalam membayar pajak, seseorang tidak mempunyai kontraprestasi yang langsung.

Selama ini banyak WP yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada WP, apalagi saat dilakukan penelitian dan pemeriksaan pajak banyak berpendapat bahwa aparat pajak pun hanya bisa berkuasa padahal kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Hal ini akan menyebabkan rendahnya kepatuhan WP. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan WP adalah memberikan pelayanan yang baik kepada WP. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan dalam infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Supadmi, 2009 dalam Rajif, 2012).

Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap WP dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang

ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada WP serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada WP besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan WP adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani WP sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemauan WP dalam membayar pajaknya (Fikriningrum, 2012).

2.1.1.7 Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2010). Sedangkan pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan.

Pada penelitian Rahmawaty, dkk (2011) mengungkapkan bahwa untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan, dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu pertama adalah kepemilikan NPWP. Dalam PJ.091/KUP/B/002/2013-00 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap WP yang memiliki

penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara langsung, untuk orang pribadi yaitu WPOP berdasarkan domisili, mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan persyaratan tertentu (foto copy KTP, foto copy kartu keluarga, dan surat keterangan domisili dan untuk orang pribadi karyawan ditambah dengan surat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan). Setelah itu, WP akan memperoleh NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Pendaftaran NPWP dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id. Setelah melakukan pengisian formulir, kemudian WP akan memperoleh NPWP dan SKTS (jangka waktu 30 hari). Sebelum jatuh tempo, WP harus ke KPP terdaftar untuk meminta SKT.

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai WP. Apabila WP telah mengetahui dan memahami hak WP seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya, pembangunan sekolah dan lainnya, serta WP mengetahui dan memahami kewajibannya terutama untuk membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka mereka akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Menurut PJ.091/KUP/B/002/2013-00 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sanksi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan WPOP adalah Rp 100.000,00. Sedangkan sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak dikenai sanksi denda

administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Adapun sanksi bagi WP yang tidak memiliki NPWP adalah sanksi pidana berupa penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun. Sanksi denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Semakin tahu dan paham WP terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula WP terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong WP taat menjalankan kewajibannya dengan baik.

Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2012 Pasal 11 ayat (1) dan (2) Tentang Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 menyatakan bahwa besarnya PTKP adalah sebagai berikut:

- a. Rp 24.300.000,00 per tahun atau Rp 2.025.000,00 per bulan, untuk diri WP orang pribadi.
- b. Rp 2.025.000,00 per tahun atau Rp 168.750,00 per bulan, tambahan untuk WP yang kawin.
- c. Rp 2.025.000,00 per tahun atau Rp 168.750,00 per bulan, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang melebihi PTKP dan tarif pajak. Tarif pajak yang diterapkan atas PKP bagi WP orang pribadi dalam negeri berdasarkan pada tarif PPh Pasal 17 ditunjukkan pada tabel 2.1. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong WP untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.

Tabel 2.1

Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: www.pajak.go.id

Kelima, WP mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang keenam adalah bahwa WP mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan ditampilkan ringkasan penelitian terdahulu yang ditunjukkan melalui tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jatmiko, Agus Nugroho (2006)	Variabel independen: sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Variabel dependen: kepatuhan WP.	Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.
2	Widayati dan Nurlis (2010)	Variabel independen: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Variabel dependen: kemauan membayar pajak.	Kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
3	Hardiningsih dan Yulianawati (2011)	Variabel independen: kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas	Kesadaran membayar pajak dan kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan

		layanan. Variabel dependen: kemauan membayar pajak.	perpajakan, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
4	Rahmawaty, dkk (2011)	Variabel independen: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Variabel dependen: kemauan membayar pajak.	Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
5	Rajif, Mohamad (2012)	Variabel independen: pemahaman, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi perpajakan. Variabel dependen: kepatuhan pajak.	Pemahaman, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.
6	Tiraada, Tryana A.M. (2013)	Variabel independen: kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus. Variabel dependen: kepatuhan WP.	Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP.
7	Jotopurnomo dan Mangoting (2013)	Variabel independen: kesadaran WP, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan WP berada. Variabel dependen: kepatuhan WP orang pribadi.	Kesadaran WP, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan WP berada secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya.

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber jurnal

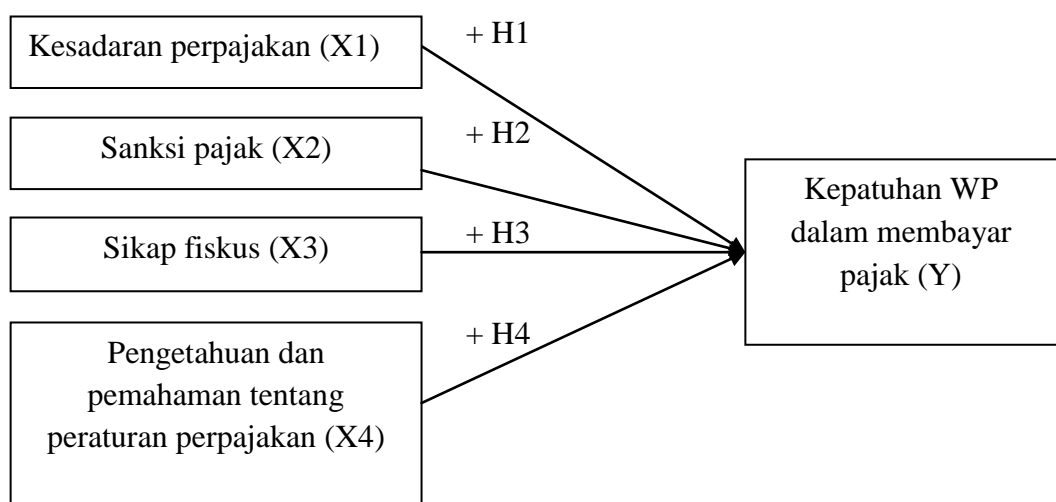
2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi WPOP dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Variabel yang

digunakan dalam penelitian ini sebanyak lima variabel yaitu empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), sikap fiskus (X3), serta pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X4). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan WP dalam membayar pajak (Y). Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar pajak kepada kas negara untuk kepentingan bersama. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, akan diri

sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Hal ini dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Jatmiko (2006), Santi (2012) dan Tiraada (2013). Namun, dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran WP atas perpajakan sangatlah diperlukan agar dapat meningkatkan kepatuhan WP untuk membayar pajaknya. Semakin tinggi kesadaran WP dalam membayar pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan WP dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar Pajak

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. WP akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh karena itu, pandangan WP mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan WP dalam membayar pajak. Dengan demikian, sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar WP tidak melanggar norma perpajakan. Hasil penelitian Jatmiko (2006), Rajif (2012), Santi (2012), dan Tiraada (2013) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Semakin tegas sanksi pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak.

2.3.3 Pengaruh Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar Pajak

Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak (fiskus) memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada WP. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap WP. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan WP membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (*attitude*) WP dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus, maka WP akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Oleh

karena pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajaknya, maka fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada WP serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Hasil penelitian Jatmiko (2006), Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Rajif (2012), dan Tiraada (2013) mengungkapkan bahwa sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Semakin baik sikap fiskus dalam memberikan pelayanan terhadap WP, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak.

2.3.4 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar Pajak

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman WP mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi WP dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman WP, maka WP dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika WP tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka WP tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010) mengungkapkan bahwa pengetahuan

dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini didukung pula oleh penelitian Rajif (2012) dan Supriyati (2012). Namun, dalam penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi variabel penelitian, definisi operasional variabel, cara pengukuran variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta metode pengumpulan data.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri atas empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, serta pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan WP dalam membayar pajak.

3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel didasarkan pada beberapa sumber atau referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel penelitian ini menggunakan skala likert lima poin.

3.1.2.1 Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran WP adalah suatu kondisi di mana WP mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, sukarela, dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang merupakan replikasi dari kuesioner penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan, membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara, pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para WP, serta membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk 6 pertanyaan.

2. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang merupakan replikasi dari kuesioner penelitian Masruroh (2013) yaitu sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat,

sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik WP, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, serta pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk 5 pertanyaan.

3. Sikap Fiskus

Sikap atau pelayanan fiskus diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan WP. Sikap fiskus dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang merupakan replikasi dari kuesioner penelitian Rosvitawati (2012) yaitu fiskus/aparat pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik, fiskus/aparat pajak senantiasa memperlakukan WP secara adil tanpa pandang bulu, penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus/aparat pajak dapat membantu pemahaman WP mengenai hak dan kewajibannya, serta fiskus/aparat pajak senantiasa memperhatikan keberatan WP atas pajak yang dikenakan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk 4 pertanyaan.

4. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dalam

penelitian ini diukur menggunakan indikator yang merupakan replikasi dari kuesioner penelitian Rahmawaty, dkk (2011) yaitu kepemilikan NPWP bagi setiap WP yang memiliki penghasilan, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban WP, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP, serta pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui pelatihan perpajakan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk 6 pertanyaan.

3.1.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan WP dalam membayar pajak. Kepatuhan WP merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan WP dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang merupakan replikasi dari kuesioner penelitian Masruroh (2013) yaitu tepat waktu menyampaikan SPT dalam 3 tahun terakhir, mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani, menghitung pajak terutang dengan benar, tepat waktu membayar pajak, tidak mempunyai tunggakan pajak, menyelenggarakan pembukuan/pencatatan sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang

perpajakan dalam 5 tahun terakhir. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk 7 pertanyaan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2006 dalam Fikriningrum, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha di Kota Semarang. Berdasarkan data dari KPP Pratama Semarang, hingga tahun 2010 tercatat sebanyak 31.607 WPOP usahawan yang efektif. Tidak semua WPOP tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini dikarenakan jumlahnya yang sangat besar dan guna efisiensi waktu serta biaya. Oleh karena itu, dilakukan pengambilan sampel. Rosgue (1975) dalam Nugroho (2012) menyatakan bahwa ukuran sampel yang lebih tepat untuk banyak penelitian adalah lebih dari 30 dan kurang dari 500, sedangkan Hair *et al.* (1998) dalam Nugroho (2012) menyatakan bahwa jumlah sampel yang harus diambil dalam suatu penelitian adalah 15 hingga 20 kali jumlah variabel yang digunakan. Banyaknya variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 variabel sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah $5 \times 20 = 100$.

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut (Rao, 1996 dalam Jatmiko, 2006):

$$n = \frac{N}{1 + N (\text{moe})^2}$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

N : populasi

moe : *margin of error max* yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Semarang, hingga tahun 2010 tercatat sebanyak 31.607 WPOP usahawan yang efektif. Maka jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{31607}{1 + 31607 (10\%)^2}$$

$$n = 99,68$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel adalah 99,68 dan untuk memudahkan perhitungan selanjutnya dibulatkan menjadi 100. Sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 WPOP. Jumlah sampel ini sudah melebihi jumlah sampel minimal yang harus diambil berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Hair *et al.* (1998). Adapun teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *random sampling*, yaitu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Kriteria yang dipakai adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha di Kota Semarang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Cooper dan Emory, 1996 dalam Jatmiko, 2006). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para WPOP yang melakukan kegiatan usaha di Kota Semarang. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para WPOP yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Ragu-ragu (R)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.5 Metode Analisis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda, yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen.

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011). Sedangkan untuk memberikan deskripsi tentang karakter variabel-variabel penelitian (kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, serta pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan) digunakan tabel statistik deskriptif yang menunjukkan rentang teoritis, rentang aktual, angka rata-rata teoritis, rata-rata aktual, dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Reliabilitas dan Validitas

Untuk menguji apakah konstruk (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi atau indikator-indikator yang diamati) yang telah dirumuskan reliabel dan valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas.

3.5.2.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2011).

3.5.2.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau tidak, maka dilakukan perbandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel, berarti item valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel, berarti item tidak valid. Adapun pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal. Ada dua

cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011).

Apabila menggunakan grafik, normalitas umumnya dideteksi dengan melihat tabel histogram. Namun demikian, dengan hanya melihat tabel histogram bisa menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan *normal probability plot* adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011):

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan di samping uji grafik, dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data terdistribusi normal apabila Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05.

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan uji glejser. Dalam hasil pengujian dengan uji glejser ini, jika tidak ada satu pun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt), yang dapat dilihat

dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi yang digunakan tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

3.5.4 Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Mengingat penelitian ini menggunakan empat variabel independen, maka persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan WP dalam membayar pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel kesadaran perpajakan

β_2 = Koefisien regresi variabel sanksi pajak

β_3 = Koefisien regresi variabel sikap fiskus

β_4 = Koefisien regresi variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

X1 = Kesadaran perpajakan

X2 = Sanksi pajak

X3 = Sikap fiskus

X4 = Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

e = Error

3.5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik, dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H_0 diterima.

3.5.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap

tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2011).

3.5.5.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak, dilakukan dengan cara menguji nilai F. Kriteria suatu hipotesis diterima adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$.

3.5.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial digunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5%. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka H_a diterima dan H_o ditolak. Namun, jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel maka H_a ditolak dan H_o diterima.